

Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov

Lingga Ayudhia¹, Yuniarti¹, Rendy Wirawan²

¹Universitas Mulawarman

²Universitas Mulawarman (rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

Crimea and Sea of Azov conflicts worsen relations between Ukraine and Russia. These conflicts not only display Ukraine and Russia as the two players, but also attract world attention, not to mention the United States which had been involved in the conflicts since 2015 until 2021. This research aims to draw the United States involvement in conflicts where Ukraine and Russia are in rivalry. Involvement of the United States in Ukraine-Russia rivalry from 2015 to 2021 was seen in various forms such as economic sanction, intervention through diplomatic channel, humanitarian assistance, military financial assistance, and deployment of US ship in Azov Sea. Those assistances are sent as a commitment of the United States to safeguard territorial integrity of Ukraine, as well as to improve border and internal security of Ukraine from Russia's aggressive behaviour. Notwithstanding, America's involvement is incapable of resolving conflict between Ukraine and Russia, because the US sided only to Ukraine.

Keywords: US Involvement, Ukraine, Russia, Crimea, Sea of Azov.

ABSTRAK

Konflik Krimea dan laut Azov semakin memperburuk hubungan antara Ukraina dan Rusia. Konflik tersebut bukan hanya membawa Ukraina dan Rusia sebagai pemain, namun turut serta menyita perhatian dunia, termasuk Amerika Serikat yang turut andil sejak 2015 hingga 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keikutsertaan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Ukraina-Rusia pada tahun 2015-2021 terlihat dalam beberapa bentuk seperti sanksi ekonomi, intervensi melalui kanal diplomatik, bantuan kemanusiaan, bantuan pendanaan militer, dan pengiriman kapal AS di laut Azov. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini merupakan komitmen AS untuk menjaga integritas wilayah Ukraina, termasuk untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan internal Ukraina dari agresivitas Rusia. Meski begitu, keterlibatan Amerika Serikat tidak mampu menyelesaikan masalah antara Ukraina dan Rusia, hal ini karena AS hanya berpihak pada Ukraina saja.

Kata Kunci: Keterlibatan AS, Ukraina, Rusia, Krimea, Laut Azov.

PENDAHULUAN

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, 15 negara pecahan dari Uni Soviet mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun setelah merdekanya negara-negara Uni Soviet, terdapat beberapa negara yang memiliki hubungan yang kurang harmonis. Contohnya seperti Armenia dan Azerbaijan, Georgia dan Rusia, serta Ukraina dan Rusia yang hingga kini juga tidak memiliki hubungan yang harmonis. Ketidakharmonisan Ukraina dan Rusia dibuktikan dengan beragam konflik yang terjadi diantara kedua negara, seperti konflik ekonomi pada tahun 2006, Konflik Krimea tahun 2014, dan Konflik Laut Azov tahun 2018.

Pada 1 Maret 2014, militer Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah selatan Ukraina tepatnya Republik Otonomi Krimea, Rusia sendiri telah terbukti melakukan aneksasi di Krimea sejak terjadinya krisis yang terjadi di Ukraina pada akhir bulan November 2013 (Calamur, 2014). Militer Rusia masuk secara besar-besaran di Krimea pada 1 Maret dikarenakan Krimea meminta bantuan militer Rusia untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Krimea, tetapi menurut Ukraina hal yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk invasi militer yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Pada akhirnya tanggal 16 Maret 2014, referendum diadakan warga yang tinggal di wilayah Krimea dalam penentuan apakah Krimea ingin tetap bersama Ukraina atau ingin bergabung dengan Rusia. Pada 17 Maret, hasil dari referendum diumumkan dengan hasil bahwa warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Hingga akhirnya tanggal 21 Maret 2014, Krimea resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia (Margareth, 2017).

Konflik yang terjadi antara Ukraina-Rusia direspon negatif tidak hanya oleh PBB saja tetapi juga negara-negara lain, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Turki (Riza, 2018) termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada juga ikut mengecam tindakan yang telah dilakukan Rusia terhadap Ukraina, dan menganggap referendum yang dilakukan

tersebut "ilegal". Pada tahun 2015, Amerika Serikat hadir dan terlibat dalam konflik Krimea sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tersebut. Amerika Serikat memiliki tujuan dan strategi dalam membangun a new sphere of influence yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kekuatan untuk menjadi imperial power (Nation & Trenin, 2010) Tidak hanya Amerika Serikat saja yang terlibat dalam konflik internal Ukraina tetapi sekutu dekat Amerika Serikat yaitu Uni Eropa juga mengikuti langkah-langkah yang sama seperti Amerika Serikat (Massaguni, 2017).

Konflik antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut, konflik ini terjadi pada Maret 2018 ketika Rusia sedang melakukan pembangunan jembatan untuk menghubungkan semenanjung dengan daratannya di Semenanjung Krimea tepatnya di Selat Kerch yang menghubungkan antara Laut Azov dan Laut Hitam.

Pada 25 November 2018, Rusia menghadang kapal-kapal militer Ukraina yang sedang melewati Selat Kerch dengan melepaskan tembakan dan menahan tiga kapal Ukraina di perairan Semenanjung Krimea. Tiga kapal yang terdiri dari kapal artileri Berdayansk, kapal artileri Nikopol, serta kapal tunda Yana Kapa yang berlayar dari pelabuhan Odessa di laut hitam ke Mariupol di Laut Azov. Ketiga kapal tersebut dihadang oleh kapal tanker milik Rusia dan enam awak kapal dilaporkan mengalami luka-luka.

Konflik yang terjadi di Laut Azov ini kembali mendapat perhatian dari Amerika Serikat, ketertarikan Amerika Serikat disini merupakan sebuah rasa ketidaksukaan terhadap apa yang telah Rusia lakukan terhadap Ukraina. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga mengecam Rusia atas Konflik Laut Azov. Sejak saat Konflik Krimea terjadi, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah progresif memberlakukan tindakan pembatasan terhadap Rusia dalam menanggapi referendum sepihak atas Konflik Krimea dan perbuatan Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan ketidakstabilan.

Konflik di Krimea dan konflik yang terjadi di Laut Azov ini merupakan puncak memburuknya hubungan antara Ukraina dan Rusia. Dalam konflik Krimea, Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea, sedangkan dalam konflik Laut Azov, Rusia menghalangi kapal militer Ukraina dengan alasan bahwa kapal Ukraina telah melanggar batas wilayah Rusia dan saling klaim antar dua pihak. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Ukraina dan Rusia pada tahun 2015-2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang ditulis oleh Massaguni Mahfud dengan judul 'Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina Tahun 2017.' Tentu penelitian terkait Ukraina-Rusia dapat dijumpai cukup banyak dan dengan perspektif yang berbeda. Namun, agar dapat membantu penulis dalam mengkonstruksikan penelitian yang lebih solid, penelitian dari Massaguni Mahfud ini ditera lebih signifikan dari konteks masalah, teori hingga temuan yang didapati.

Penelitian Massaguni Mahfud dimulakan dengan menjelaskan bahwa pada tahun 2011 Uni Eropa telah sepakat dalam penandatanganan *Association Agreement*, tetapi hal tersebut ditunda dikarenakan situasi internal di Ukraina yang pada saat itu sedang tidak stabil. Pada November 2013, agenda *Association Agreement* tersebut kembali diadakan untuk ditandatangani oleh Ukraina. Namun Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych menolak menandatangani *Association Agreement* tersebut. Hal ini memicu kemarahan kelompok oposisi yang pro terhadap Eropa sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Presiden Viktor Yanukovych harus mundur dari jabatannya sebagai Presiden Ukraina.

Pemerintahan baru hasil penunjukan parlemen Ukraina dianggap pro Eropa oleh Rusia sehingga menyebabkan kemarahan besar dari Rusia. Pada 1 Maret 2014,

Vladimir Putin, Presiden Rusia memenangkan persetujuan untuk menginvasi Ukraina. Pada 6 Maret 2014, parlemen Krimea melakukan pengumuman suara untuk bergabung dengan Rusia. Pada 16 Maret 2014, referendum diselenggarakan dan masyarakat Krimea banyak yang memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada 21 Maret 2014, Vladimir Putin menandatangani UU untuk melengkapi aneksasi Krimea.

Pemberlakuan UU aneksasi Krimea pada 16 Maret 2014 tersebut menyebabkan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Vladimir Putin, serta sekutu dekat Amerika Serikat yaitu Uni Eropa mengikuti langkah-langkah yang sama seperti Amerika Serikat. Sanksi ini menyebabkan banyak terhentinya aktifitas ekonomi antara Rusia dengan Amerika Serikat serta Rusia dengan Uni Eropa.

Sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia, menyebabkan kedua negara tersebut berada pada titik terendah pasca Perang Dingin dan Sanksi yang Uni Eropa berikan tidak memiliki efek pada Rusia yang dimana adanya tekanan pada elit politik yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Rusia serta perubahan perilaku politik Rusia. Sanksi tersebut justru membantu pemerintah Rusia untuk memobilisasi dan memberi dukungan masyarakat kepada pemerintahan di Rusia. Sanksi yang diberikan tersebut justru menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme pada masyarakat Rusia.

Sanksi yang diberikan kepada Rusia membuat sebagian besar penduduk Rusia percaya bahwa gagasan di balik sanksi yang diberikan merupakan cara untuk melemahkan ekonomi Rusia dan hanya membuat negara menjadi tidak stabil. Survey lain menunjukkan bahwa persatuan penduduk Rusia telah berkembang secara drastis. Persentase orang yang percaya bahwa Rusia merupakan negara adidaya pada bulan Maret 2014 berkembang dari 14% hingga 68% pada November 2014. Fakta tersebut, menjadi sebuah klaim bahwa sanksi individu maupun ekonomi yang diberikan Uni Eropa tersebut telah gagal

menciptakan tekanan bagi penduduk domestik Rusia agar rezim tersebut perlu mengalami perubahan.

Hasil semua jawabannya sesuai termasuk sanksi-sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa. Yang dimana Uni Eropa melakukan langkah-langkah yang sama dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat dalam pemberlakuan sanksi dan diikuti oleh Uni Eropa dalam pemberian sanksi terhadap Rusia atas krisis yang terjadi di Ukraina. Kemudian, adanya sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Rusia tidak memberikan efek yang Uni Eropa inginkan terjadi di Rusia yaitu adanya tekanan pada elit politik yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Rusia serta adanya perubahan perilaku politik di Rusia. Sanksi yang Uni Eropa berikan diharapkan dapat menggoyahkan dukungan publik untuk pemerintah.

Dari pihak Uni Eropa, sanksi balasan yang ditetapkan oleh Rusia tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Uni Eropa. Hal ini dibuktikan oleh sanksi balasan yang Rusia tetapkan. Ekspor di negara anggota Uni Eropa di sektor agrikultur tetap stabil dikarenakan masing-masing mampu mencari alternatif tujuan ekspor selain Rusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif yaitu merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan kasus - kasus yang bersifat umum ke khusus layaknya piramida terbalik, serta penelitian yang berupa survey yang mendalam mengenai kasus tertentu.

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep intervensi dengan merujuk pada J. G. Starke dan K. J. Holsti. Adapun intervensi menurut J.G Starke ada dua, yaitu intervensi militer dan intervensi non militer. Intervensi militer merupakan intervensi yang dilakukan melalui

penggunaan kekerasan, dimana pelaku intervensi menggunakan kekuatan militernya dalam melakukan intervensi terhadap suatu konflik atau proses penyelesaian konflik suatu negara. Sedangkan, intervensi non-militer merupakan intervensi yang dilakukan dengan cara-cara damai, seperti negosiasi, diplomasi, mediasi, dan cara-cara lainnya. Intervensi non militer merupakan intervensi yang menggunakan cara-cara halus yaitu dengan memberikan pertolongan seperti pengiriman obat-obatan, bantuan pangan dan tempat tinggal, dokter yang melayani korban konflik, bantuan alat-alat keselamatan, dan lain-lain (J.G Starke, 1988).

K.J Holsti (1988) menemukan bahwa setidaknya ada enam jenis intervensi dalam hubungan internasional dan politik internasional, yaitu intervensi diplomatik, intervensi klasik/rahasia, demonstrasi kekuatan, subversi, perang gerilya, dan intervensi militer.

HASIL DAN ANALISA

Ukraina dan Rusia merupakan 2 negara pecahan Uni Soviet pada tahun 1991. Kedua negara ini awalnya memiliki hubungan bilateral yang baik, namun seiring berjalannya waktu, terjadi ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Ketegangan ini dibuktikan dengan berbagai macam konflik yang terjadi diantara kedua negara tersebut.

Konflik antara Ukraina dan Rusia terjadi hingga mendapat perhatian dari negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pada tahun 2015, Amerika Serikat hadir dan terlibat dalam konflik Krimea sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tersebut. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia berlanjut hingga tahun 2021.

Dinamika Hubungan Ukraina-Rusia

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, pecahan dari Uni Soviet terbagi ke dalam 15 negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan berdiri menjadi negara yang berdaulat. Negara-negara tersebut adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia,

Estonia, Georgia, Latvia, Lituania, Moldova, Kazakhtan, Kirigiztan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, dan Rusia.

Di antara negara-negara tersebut, hubungan yang menarik kemudian terlihat antara Ukraina dan Rusia. Secara ekonomi, Rusia mengikat Ukraina dalam kerjasama di bidang energi. Hubungan kerjasama antara Ukraina dan Rusia di sektor energi sangat penting bagi kedua negara. Hal ini diikuti oleh terjadinya kesepakatan kerjasama antara kedua negara tersebut, salah satunya menjalani kerjasama dengan Ukraina. Ukraina sebagai negara transit sangat penting bagi Rusia yang bergerak dalam bidang energi dan terjalin kerjasamanya sejak tahun 1990-an untuk mengirim gas alam ke negara-negara Eropa. Perjanjian untuk transit dan ekspor gas menuju Ukraina dari Rusia ditandatangani pada tanggal 18 Februari 1994. (IEA, 2006) Transit energi merupakan hal yang penting bagi Ukraina dan Rusia. Ukraina sangat bergantung pada gas alam Rusia, begitu juga Rusia yang sangat membutuhkan Ukraina sebagai negara transit menuju negara-negara Eropa.

Memasuki tahun 2005 hingga tahun 2009 hubungan keduanya mengalami ketegangan dalam konflik yang terjadi saat Rusia menjadi negara pemasok utama energi gas alam. Rusia memiliki perusahaan energi yang bernama Gazprom dan merupakan perusahaan pemasok gas alam ke berbagai wilayah Eropa serta merupakan perusahaan pengekspor sepertiga dari kebutuhan gas dunia. Pada 28 Agustus 2003, Rusia menyediakan sekitar 25% perdagangan gas alam dunia dan Rusia secara resmi menyatakan bahwa posisi pasar energi global Rusia harus diperkuat.

Pada tahun 2006, terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pasokan gas dari Rusia ke Uni Eropa sebagai konsumen utama ekspor minyak dan gas alam Rusia. Suplai gas Rusia ini disalurkan ke Uni Eropa menggunakan pipa gas Trans-Eropa milik Rusia "Bratstvo" dan "Sojuz" serta pipa minyak "Druzhba" yang tersebar melewati

wilayah Ukraina (Victor, 1995). Konflik terjadi saat Rusia menaikkan harga gas kepada Ukraina dengan tujuan untuk mengontrol produksi gas sebagai pendapatan negara Rusia dan menjadikan sektor energi sebagai keuntungan negara Rusia dengan meningkatkan harga gas dua kali lipat di tahun 1990-an.

Selanjutnya, pada tahun 2013, terjadi konflik di Ukraina yang disebabkan oleh konflik internal. Konflik ini merupakan sebuah ancaman bagi hegemoni Rusia di negara-negara pecahan Uni Soviet. Konflik ini bermula saat presiden Viktor Yanukovych mengeluarkan kebijakan untuk menarik perjanjian *Free Trade Area* dengan Uni Eropa dan memilih untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan Rusia. Sikap presiden Viktor Yanukovych ini menyebabkan terjadinya protes hingga terjadi aksi demonstrasi oleh masyarakat Ukraina. (Fahmi, 2019)

Militer Rusia masuk secara besar-besaran di Krimea pada 1 Maret dikarenakan Krimea meminta bantuan militer Rusia untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Krimea, tetapi menurut Ukraina hal yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk invasi militer yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Pada akhirnya tanggal 16 Maret 2014, referendum diadakan warga yang tinggal di wilayah Krimea dalam penentuan apakah Krimea ingin tetap bersama Ukraina atau ingin bergabung dengan Rusia. Pada 17 Maret, hasil dari referendum diumumkan dengan hasil bahwa warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Pada akhirnya tanggal 21 Maret 2014, Krimea resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia. (RT World, 2014)

Konflik antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut, konflik ini terjadi pada Maret 2018 ketika Rusia sedang melakukan pembangunan jembatan untuk menghubungkan semenanjung dengan daratannya di Semenanjung Krimea tepatnya di Selat Kerch yang menghubungkan antara Laut Azov dan Laut Hitam. Pada bulan Juli 2018, pemerintah Rusia akhirnya

menyelesaikan pembangunan jembatan di atas Selat Kerch namun dalam pembangunannya Rusia melakukan pemindahan kapal perang miliknya dari Laut Kaspia ke Laut Azov serta membangun pangkalan militer, bahkan Rusia telah mengubah nama Laut Azov menjadi “danau Rusia” secara *de facto*. Hal ini membuat Ukraina juga menyiapkan pasukan militer dan kapal perang dalam menanggapi peningkatan militer Rusia. (Bentzen, 2018) Padahal Ukraina dan Rusia dalam perjanjian bilateral tahun 2003 telah berbagi perairan teritorial Laut Azov dan Selat Kerch, yang memisahkan Laut Azov dari sisa Laut Hitam.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Kawasan Eropa Timur

Pasca Perang Dunia ke II, politik internasional diwarnai dengan Konflik Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1947. Konflik ini berakar pada persepsi di mana masing-masing pihak merasa terancam. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet selalu memandang curiga dan bersaing menjadi negara superior. Posisi geografis dan trauma perang menjadikan Uni Soviet selalu merasa tidak aman. Karena itu, Uni Soviet mencari daerah pengaruhnya. Langkah Uni Soviet ini dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman. Akibatnya, terjadilah Perang Dingin antara Uni Soviet sebagai blok Timur dan Amerika Serikat sebagai blok Barat. (Salamah, 2017)

Pada saat terjadinya Perang Dingin, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negerinya di kawasan Eropa Timur. Pada 12 Maret 1947, presiden Harry S Truman mengeluarkan kebijakan luar negeri demi mencegah penyebaran komunisme di dunia internasional. Kebijakan tersebut merupakan Kebijakan Penahanan Truman (Doktrin Truman) yang merupakan kebijakan besar pertama selama Perang Dingin yang menggunakan berbagai strategi untuk mencegah penyebaran komunisme ke luar negeri. Pada tahun 1971, presiden Richard Nixon membuat kebijakan “*Détente*” yang artinya dalam bahasa Prancis “relaksasi”. Kebijakan ini berupaya untuk meredakan

ketegangan dalam Perang Dingin terutama dalam situasi politik. Pada tahun 1976, peranan Amerika Serikat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikenal di tingkat internasional. Presiden Jimmy Carter dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat menekankan adanya penggunaan HAM daripada anti-komunisme. Jimmy Carter ingin Amerika Serikat memimpin dunia dalam mempromosikan HAM. (Strong, 2000)

Seiring berkembangnya globalisasi yang berubah secara signifikan, Perang Dingin mengalami keruntuhan pada tahun 1991 dengan indikasi Uni Soviet berubah menjadi Republik Rusia. Pecahan Uni Soviet terbagi ke dalam 15 negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan berdiri menjadi negara yang berdaulat. Berkembangnya globalisasi dan teknologi membawa pengaruh besar pada berkembangnya arus liberalisasi dan demokratisasi yang menyebar ke seluruh negara-negara di dunia, tak terkecuali Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur yang kemudian banyak menuntut adanya pembaharuan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya bagi keruntuhan Perang Dingin adalah perubahan Uni Soviet dibawah rezim Gorbachev. (Salamah, 2017)

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dibubarkannya Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia pada akhirnya mengalami perubahan. Presiden Rusia, Boris Yeltsin memiliki harapan untuk menormalisasi kembali hubungan Rusia dengan Amerika Serikat terhadap demokratisasi negara. Boris Yeltsin menginginkan Rusia dengan institusi demokrasi gaya barat dan ekonomi pasar bebas sehingga dapat merubah arah hubungan Amerika Serikat dengan Rusia di era pasca Perang Dingin. Sehingga, hubungan Amerika Serikat dan Rusia pada akhirnya berlanjut di jalur yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya START II (*Strategic Arms Limitation Treaty*) oleh Amerika Serikat pada tahun 1996. Hal ini menggambarkan kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan dunia yang damai dan aman.

Pada tahun 2001, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan “*War on Terrorism*” di bawah kepemimpinan presiden George W. Bush. *War on Terrorism* adalah istilah yang biasa diterapkan pada kampanye militer internasional yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Inggris dengan dukungan dari negara-negara di kawasan Eropa Timur, setelah terjadinya tragedi serangan teroris 11 September 2001. (Strong, 2000)

Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ukraina. Hal ini dibuktikan saat Amerika Serikat menanggapi terjadinya konflik Krimea di Ukraina, Amerika Serikat meyakinkan pemerintah Ukraina melalui janji bantuan ekonomi substansial untuk mengadopsi reformasi ekonomi yang telah lama tertunda dan sangat dibutuhkan Ukraina. Amerika Serikat juga memberi jaminan politik untuk kemerdekaan Ukraina dan integritas teritorial. Hal ini ditandai dengan penandatanganan “Momerandum Budapest 1994”. Sehingga, setelah aneksasi Rusia ke Ukraina dalam konflik Krimea dan Laut Azov, para petinggi Amerika Serikat datang untuk mengungkapkan dengan tegas dalam mendukung kedaulatan Ukraina, serta menjaga integritas teritorial di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional. (Welt, 2020)

Rusia merupakan pecahan Uni Soviet yang mewarisi dua pertiga wilayah yang diberkahi sumber daya alam yang luas dan persenjataan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Rusia merupakan negara adidaya nuklir yang merupakan satu-satunya negara yang menimbulkan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rusia, hal ini memungkinkan Rusia untuk mendominasi kawasan dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya di kawasan Eropa Timur. Dalam menanggapi hal ini, Amerika Serikat mengikat negara-negara yang berada di Eropa Timur dengan kesepakatan kerjasama. Amerika Serikat mengharapkan negara-negara komunis yang berada di kawasan Eropa Timur dapat terus menjadi sekutu Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memiliki kekuatan di Eropa

Timur, dikarenakan masyarakat tidak melupakan kejahannya pemerintahan komunis. Hal inilah yang menjadi alasan Amerika Serikat semakin kuat untuk mempertahankan negara-negara di kawasan Eropa Timur di orbitnya, daripada menyerahkan negara-negara sekutu pada Rusia. (Artur, 2015)

Pada tahun 2015, Amerika Serikat memutuskan untuk hadir dan terlibat dalam konflik Ukraina dan Rusia. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden Barrack Obama beserta komite hubungan luar negeri Amerika Serikat membuat sebuah pernyataan untuk terlibat dalam konflik Ukraina dan Rusia terkait Semenanjung Krimea. Dalam keterlibatan ini, Amerika Serikat hadir dengan membantu pemerintah Ukraina, kedua negara ini juga memiliki hubungan yang dekat dan merupakan mitra internasional yang baik sejak kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991. Alasan keterlibatan Amerika Serikat yaitu untuk menekan pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur. Sebagai sebuah negara yang strategis dan dapat mempengaruhi kedudukan Rusia di kawasan Eropa Timur, Ukraina mendapatkan perhatian oleh Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan dalam mempertahankan posisinya di dunia. Amerika Serikat juga memiliki tujuan dan strategi dalam membangun *a new sphere of influence* yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kekuatan untuk menjadi *imperial power*. (Nation & Trenin, 2010)

Hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Eropa Timur menunjukkan bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini bukanlah hal yang baru. Amerika Serikat memiliki kebijakan dan sekutu-sekutu di kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, saat Amerika Serikat terlibat dalam konflik Ukraina dan Rusia, dalam perspektif Amerika Serikat, keterlibatan Amerika Serikat tersebut merupakan hal yang wajar. Amerika Serikat dengan Ukraina merupakan sekutu yang dekat. Sedangkan, hubungan antara Amerika Serikat dengan Rusia kembali memburuk, kedua negara tersebut saling mempertahankan kekuatannya untuk mendominasi negara-negara yang

berada di kawasan Eropa Timur khususnya Ukraina.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Krimea

Sejak tahun 2015, Amerika Serikat resmi terlibat dalam Konflik Krimea dan tahun 2018, terlibat dalam Konflik Laut Azov. Keterlibatan ini berdampak positif terhadap hubungan dengan Ukraina, sedangkan berdampak negatif terhadap hubungan dengan Rusia. Dalam perspektif K.J Holsti dan J.G Starke tentang intervensi, intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam konflik ini merupakan intervensi militer, non militer, dan intervensi diplomatik.

1. Intervensi Non Militer

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Krimea ini dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Keterlibatan ini berbentuk intervensi militer dan juga intervensi non militer.

a. Sanksi Ekonomi

Dalam menanggapi Konflik Krimea, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi yang berupa pembekuan visa Amerika Serikat dan diberatkan kepada perusahaan negara dan perusahaan besar asal Rusia. Sanksi tersebut berupa penolakan pemberian kartu kredit luar negeri kepada perusahaan besar milik Rusia dan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, pembekuan aset, serta pelarangan ekspor teknologi tinggi dan militer dari barat ke Rusia. Amerika Serikat berharap dengan memberikan sanksi ini, dapat membuat Rusia berhenti menyerang Ukraina (Krishnadev, 2014). Di antara pejabat Rusia yang akan menghadapi pembekuan aset adalah Sergei Ivanov, kepala staff Putin, dan Sergei Naryshkin, yang secara vokal mendukung aneksasi Rusia di Krimea. Dengan adanya sanksi ekonomi ini, Amerika Serikat

berupaya untuk mencegah kemungkinan adanya serangan militer Rusia di wilayah Ukraina Timur dan Selatan Ukraina (Roberts et al., 2014).

b. Bantuan Kemanusiaan

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia menghadirkan banyaknya keterlibatan Amerika Serikat termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang untuk membantu Ukraina dalam Konflik Krimea. Pada tahun 2015, konflik yang terjadi di Krimea ini menyebabkan banyaknya pengungsi yang totalnya mencapai hampir 969.000 orang. Kekerasan di konflik Krimea mengakibatkan lebih dari 4.100 kematian dan hampir 9.800 orang yang cedera. Pemerintah Amerika Serikat menyediakan lebih dari \$15,3 juta dalam bantuan kemanusiaan untuk mendukung penduduk yang terkena dampak Konflik Krimea. Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)/Kantor Bantuan Bencana Asing (OFDA) memberikan bantuan dana tunai kepada rumah tangga pengungsi senilai \$300 per paket, hingga 30 Januari 2015, dan telah mendistribusikan lebih dari 11.600 bantuan tunai kepada rumah tangga di Ukraina timur (USAID, 2015).

Pada tahun 2016, menteri luar negeri Amerika Serikat John Kerry mengumumkan adanya paket bantuan baru dari Amerika Serikat sebesar \$23 juta dana bantuan kemanusiaan kepada Ukraina untuk mengatasi krisis yang terjadi di Ukraina Timur. Bantuan kemanusiaan yang telah Amerika Serikat berikan kepada Ukraina hingga tahun 2016 totalnya berjumlah lebih dari \$135 juta.

Pada tahun 2017, PBB merilis *Strategic Human Resource Planning* (HRP), Ukraina meminta

\$214 juta untuk memenuhi kebutuhan 2,6 juta orang dengan bantuan penyelamatan jiwa pada tahun 2017. Rencana tersebut diprioritaskan \$12 juta untuk aktivitas penting yang membutuhkan pendanaan segera. USAID/OFDA telah menyediakan hampir \$4,9 juta untuk mendukung intervensi perlindungan kemanusiaan yang ada di Ukraina dengan memberikan intervensi darurat melalui *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan juga menyediakan hampir \$274 juta untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sistem pasar di Ukraina. Pada akhir tahun 2017, PBB mencatat lebih dari 100 kematian warga sipil terkait konflik dan hampir 500 orang cedera dan menyebabkan sekitar 160 korban (USAID, 2017).

Pada tahun 2018, PBB melaporkan bahwa, hampir 40% dari orang-orang yang tinggal di sepanjang jalur kontak terkena dampak penembakan setiap harinya. Konflik pada tahun 2018, telah meningkat sekitar 4,4 juta orang di Ukraina timur pada Desember. Pada 7 Desember 2018, PBB merilis Rencana Tanggap Kemanusiaan Ukraina (HRP), Ukraina meminta \$187 juta untuk sekitar 2,3 juta orang. Pada 12 Desember 2018, duta besar Amerika Serikat Marie L. Yovanovitch memperbarui deklarasi bencana untuk Ukraina karena adanya perpindahan yang meluas dan kebutuhan manusia yang berkelanjutan dari populasi yang rentan di Ukraina timur (USAID, 2018).

Pada 31 Januari 2019, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) meluncurkan Rencana Tanggap Kemanusiaan (HRP) 2019, Ukraina meminta \$162 juta untuk memenuhi

kebutuhan kemanusiaan pada tahun 2019. HRP pada tahun 2019 sedikit menurun dari HRP tahun 2018, yang meminta \$187 juta untuk mendukung 2,3 juta individu yang terkena dampak konflik. Selain itu, Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)/*Food for Peace* (FFP) juga menyumbang hampir \$2,1 juta untuk menyediakan sekitar 8.000 orang sepanjang jalur kontak dengan bantuan tunai untuk makanan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan selama empat bulan selama musim dingin (USAID, 2019).

Keterlibatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Konflik Krimea sejalan dengan definisi konsep intervensi yang dikemukakan oleh K.J. Holsti bahwa intervensi yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu tindakan yang mempunyai dampak tertentu baik secara langsung atau lambat laun pada politik dan ekonomi dalam negeri suatu negara yang sedang diintervensi (K.J. Holsti, 1988). Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan jenis Intervensi non-militer oleh J.G. Starke yang di mana suatu negara melakukan intervensi non-militer dengan menggunakan cara-cara halus yaitu dengan memberikan bantuan berupa pengiriman obat-obatan, bantuan pangan dan tempat tinggal, dokter yang melayani korban konflik, bantuan alat-alat keselamatan, dan lain-lain (J.G. Starke, 1988).

2. Intervensi Diplomatik

Dalam menanggapi konflik ini, Presiden Barrack Obama mengecam tindakan yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap aneksasi yang dilakukan kepada Ukraina. Presiden Barrack Obama juga melakukan langkah

diplomatik, yaitu menanggukhan pertemuan persiapan untuk KTT G8 di Sochi, Rusia, serta membatalkan pembicaraan tentang perdagangan dan hubungan komersial dengan Rusia.

3. Intervensi Militer

Dalam keterlibatan Amerika Serikat terkait Konflik Krimea, Amerika Serikat juga mengirimkan sejumlah bantuan militer. Bantuan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejalan dengan definisi konsep intervensi militer yang diungkapkan oleh K.J Holsti, bahwa intervensi militer merupakan pengiriman kekuatan militer baik berupa personil, persenjataan, dana militer, maupun armada militer lainnya (K.J Holsti, 1988). Dalam definisi intervensi militer, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer negara yang mempunyai unsur terpenting dalam suatu negara yang melakukan intervensi, yaitu adanya *power* (Whuny, 2018). Amerika Serikat telah hadir dan terlibat untuk memberikan bantuan militer kepada Ukraina yaitu berupa dana bantuan militer, dan pelatihan serta pendampingan kepada anggota angkatan bersenjata Ukraina dalam kelompok pelatihan multinasional gabungan Ukraina (Kim, 2019).

Amerika Serikat mengirimkan jet tempur F-16 ke Polandia tengah untuk mengambil bagian dalam pelatihan militer yang diperluas. Amerika Serikat juga sangat berkomitmen untuk keamanan sekutu Eropa Timur jika dalam keadaan yang sangat sulit atau berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Selain itu, Amerika Serikat juga menjamin adanya pinjaman dana militer untuk Ukraina sebesar \$1 miliar dalam menanggapi Konflik Krimea (Krishnadev, 2014).

Penerapan sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait Konflik Krimea berjalan tidak

maksimal dikarenakan Rusia tidak merasakan dampak sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Rusia semakin memperlihatkan kekuatannya di Ukraina. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat mempertimbangkan opsi agresi militer untuk melawan Rusia. (Aziz, 2014)

Pada tahun 2017, Departemen luar negeri Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa Pentagon yang merupakan gedung departemen pertahanan Amerika Serikat akan memasok senjata dengan kekuatan penuh ke Ukraina. Langkah Presiden Donald Trump ini merupakan upaya Amerika Serikat dalam memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina sebagai bagian dari komitmen Amerika Serikat untuk membantu Ukraina dalam membangun kapasitas pertahanan jangka panjang negara tersebut. (Eric, 2017).

Ukraina juga memperoleh anggaran dari Amerika Serikat sekitar \$47 juta untuk persenjataan. Bantuan dana militer yang diberikan Amerika Serikat telah berdasarkan UU Otorisasi Pertahanan Nasional UU Amerika Serikat. Persenjataan tersebut merupakan peluncur FGM-148 Javelin (sebuah peluru kendali jarak jauh *anti-tank portable fire-and-forget* buatan Amerika Serikat yang menggantikan rudal *anti-tank dragon*) dan senapan runduk (*sniper*) jenis Barret M10A1 yang dikhususkan untuk keperluan pertempuran hasil evolusi dari model Barret 82A1 (Eric, 2017).

Pada 12 September 2019, Presiden Donald Trump menyatakan telah mengeluarkan bantuan dana militer sebesar \$250 juta dan memberi dana tambahan militer sebesar \$140 juta. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy mengatakan dalam sebuah konferensi di Kiev, bahwa Ukraina akan menerima tambahan dana dan berterima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya berupa

sanksi-sanksi ekonomi, langkah diplomatik, bantuan kemanusiaan, serta bantuan militer kepada Ukraina.

Bantuan dana militer yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam konflik Krimea sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 berjumlah lebih dari \$3,7 miliar, ditambah tiga jaminan pinjaman pemerintah senilai \$1 miliar. Prioritas bantuan keamanan Amerika Serikat kepada Ukraina yaitu dengan memberikan program bantuan teknis, pelatihan, peralatan kepada angkatan bersenjata Ukraina, layanan keamanan untuk mempertahankan integritas wilayah Ukraina, serta meningkatkan keamanan perbatasan dan internal dari agresi Rusia (U.S Embassy, 2015).

Keterlibatan Amerika Serikat tidak dapat menyelesaikan konflik. Karena Amerika Serikat hanya berpihak kepada salah satu pihak saja yaitu Ukraina dan tidak memabantu penyelesaian antara kedua negara yang sedang berkonflik. Amerika Serikat juga tidak berhasil menengahi Konflik Krimea karena masyarakat Krimea sendiri yang ingin bergabung dengan Rusia. Pada 1 Maret 2014, Militer Rusia masuk secara besar-besaran di Krimea, dikarenakan Krimea sendiri yang meminta bantuan militer Rusia untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Krimea. Hingga pada akhirnya referendum diadakan warga yang tinggal di wilayah Krimea dalam penentuan apakah Krimea ingin tetap bersama Ukraina atau ingin bergabung dengan Rusia. Pada 17 Maret, hasil dari referendum diumumkan dengan hasil bahwa mayoritas warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Pada akhirnya tanggal 21 Maret 2014, Krimea resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Azov

1. Intervensi Diplomatik

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Azov ini dilakukan pada tahun 2018. Keterlibatan ini juga berbentuk intervensi militer dan non militer. Konflik antara Ukraina dan Rusia kembali memanas ketika kapal perang Rusia menembaki tiga kapal Ukraina di perairan Semenanjung Krimea, Laut Azov.

Dalam menanggapi konflik ini, departemen luar negeri Amerika Serikat mengecam tindakan Rusia atas Konflik Laut Azov. Sementara, juru bicara departemen Amerika Serikat, Heather Nauert, menuduh Rusia berusaha mengacaukan Ukraina melalui campur tangan dengan kapal (Rane, 2018). Konflik ini juga memicu tanggapan diplomatik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk membatalkan pembicaraan dengan presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 November di Argentina pada tanggal 30 November (Fletcher, 2019). Dalam menanggapi konflik Laut Azov, duta besar Amerika Serikat untuk Ukraina, Kurt Volker, langsung mengunjungi Kiev dan mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak persenjataan, Amerika Serikat juga berpotensi membantu Ukraina dengan cara lain melalui penyediaan bantuan keuangan atau investasi pelabuhan untuk mengkompensasi Ukraina atas beberapa kerugiannya (Genya, 2018).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam langkah diplomatik menanggapi konflik yang terjadi di Laut Azov ini, sejalan dengan jenis intervensi oleh K.J. Holsti yang pertama yaitu intervensi diplomatik, yang biasanya terjadi apabila seorang diplomat memberikan komentar atau memihak suatu persoalan politik yang sedang melanda negara tempatnya ditugaskan.

2. Intervensi Militer

Dalam keterlibatan Amerika Serikat terkait Konflik Laut Azov, Amerika Serikat juga mengirimkan sejumlah bantuan militer. Pada 26 November 2018, pesawat mata-mata Amerika Serikat memasuki daerah Laut Hitam setelah ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia atas Selat yang memisahkan Laut Azov. Pesawat pengintai jenis *Boeing RC-135V* lepas landas dari *Naval Base* Amerika Serikat di Souda Bay di Crete. Elektronik intelejen pesawat itu dilaporkan mengudara di Bulgaria pada pukul 06.30 GMT dan terbang ke arah Semenanjung Krimea, di Laut Hitam. Langkah yang dilakukan Amerika Serikat tersebut dilakukan setelah Rusia menahan tiga kapal Angkatan Laut Ukraina.

Pada 5 Desember 2018, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal perang ke Laut Hitam untuk memberikan tekanan balik terhadap Rusia, Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar dengan kapal perusak rudal *USS McCampbell* di dekat perairan *Peter the Great Bay* untuk menantang klaim maritim Rusia. Kapal perang ini melakukan “Operasi Kebebasan Navigasi” untuk memberikan tekanan balik terhadap Rusia di Laut Azov (Browne, 2020). Dalam hal ini, Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjunjung tinggi prinsip kebebasan laut yang telah lama dihormati. Amerika Serikat juga meningkatkan keamanan dan pembangunan militernya di Laut Azov, yaitu dengan mengirimkan persenjataan mematikan terutama sistem rudal *anti-tank Javelin* dan melakukan pelatihan militer (Kim, 2019).

Pada tahun 2019, Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar menggunakan kapal perusak berpeluru kendali *USS Donald Cook* menuju ke Laut Hitam untuk melakukan operasi keamanan

maritim serta meningkatkan stabilitas maritim dengan sekutu NATO di wilayah Selat Kerch. Amerika Serikat juga mengirim dua kapal *Coast Guard* ke Kiev dan berencana untuk mengirimkan radar pengawas pantai ke Ukraina, serta membantu dalam pembangunan pusat operasi maritim untuk Ukraina di dekat Odessa (Marson, 2019).

Pada tahun 2020, Amerika Serikat memberi bantuan keamanan yang berfokus pada peningkatan kapasitas Ukraina untuk mempertahankan perairan teritorialnya. Pada bulan Juni 2020, pemerintah Amerika Serikat memberi tahu Kongres tentang kemungkinan Penjualan Militer Asing (*Foreign Military Sales*) ke Ukraina berupa 16 kapal patroli Mark VI sekitar \$600 juta. Kapal patroli Mark VI merupakan kapal patroli bersenjata yang mampu melawan potensi agresi Rusia di perairan teritorial Ukraina. Kapal ini juga akan memungkinkan integrasi Ukraina ke dalam program Kesadaran Domain Maritim Laut Hitam regional, di mana Amerika Serikat telah menyumbangkan \$142 juta dalam Pembiayaan Militer Asing (*Foreign Military Financing*).

Pada tahun 2021, Amerika Serikat mengumumkan adanya paket bantuan militer baru sebesar \$125 juta untuk Ukraina di bawah pemerintahan Joe Biden. Paket bantuan ini didanai melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI). Bantuan Item terbesar yaitu dua kapal patroli Mark VI yang diproduksi oleh *SAFE Boats International*, yang dapat membawa armada Ukraina hingga delapan kapal. (Aaron dan Howart, 2021).

Bantuan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam konflik Laut Azov ini sejalan dengan definisi konsep intervensi militer yang diungkapkan oleh K.J Holsti, bahwa intervensi militer merupakan pengiriman kekuatan militer baik berupa personil,

persenjataan, dana militer, maupun armada militer lainnya. Dalam konflik Laut Azov, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan kapal perang, bantuan dana militer, persenjataan, serta pelatihan militer (K.J Holsti, 1988).

Amerika Serikat berkomitmen dalam memperkuat dan mempertahankan kedaulatan teritorial, mencegah kemungkinan adanya agresi militer, menjaga stabilitas maritim negara, serta mempertahankan integritas wilayah Ukraina dalam membangun kapasitas pertahanan jangka panjang dengan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina sebagai bagian dari komitmen Amerika Serikat, serta dalam menciptakan kawasan internasional yang lebih stabil, aman, dan sejahtera, serta meningkatkan keamanan perbatasan dan internal dari agresi Rusia dalam jangka waktu 2015-2021

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia (Konflik Krimea dan Konflik Laut Azov) merupakan puncak memburuknya hubungan antara Ukraina dan Rusia. Konflik antara Ukraina dan Rusia ini membuat Amerika Serikat turut terlibat. Amerika Serikat hadir dan terlibat melalui jenis intervensi non-militer (memberikan sanksi ekonomi, langkah diplomatik, serta bantuan kemanusiaan) dan intervensi militer (dengan memberi bantuan dana untuk pelatihan militer sebesar \$3,7 miliar dan mengerahkan kapal militer Amerika Serikat). Bantuan tersebut merupakan komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas wilayah Ukraina, serta meningkatkan keamanan perbatasan dan internal dari agresi Rusia dalam jangka waktu 2015-2021. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Ukraina-Rusia ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik, karena Amerika Serikat hanya berpihak kepada salah satu pihak saja yaitu Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. (2014). Sanksi Ekonomi Tak Mempan, Amerika Serikat Siapkan Militer Lawan Rusia. *Lensa Indonesia*, tersedia di <http://www.lensaindonesia.com/2014/03/24/sanksi-ekonomi-tak-mempan-amerika-serikat-siapkan-militer-lawan-rusia.html>
- Browne, R. (2020). Amerika Bersiap Berlayar ke Laut Hitam di Tengah Konflik Rusia-Ukraina. *Mata-mata Politik*, tersedia di <https://www.matamatapolitik.com/amerika-bersiap-berlayar-ke-laut-hitam-di-tengah-konflik-rusia-ukraina/>
- Bushuev, V. V., Saenko, V. V., dan Gromov. (2019). The Government of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030. *Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow*.
- Calamur, K. (2014). U.S.Steps In Response To Russia's Intervention In Ukraine. *NPR*, tersedia di <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/07/287278214/u-s-steps-in-response-to-russias-intervention-in-ukraine>
- Fletcher, C. (2019). Aggression at Sea? Russia-Ukraine Conflict in the Sea of Azov. *George Washington University Pre-Law Association the Justice Journal*.
- Eriec, D. (2017). Amerika Serikat Fasilitas Ukraina Alutsista Besar-Besaran, tersedia di Amerika Serikat Fasilitas Ukraina Alutsista Besar-besaran. *Nusantara News*.
- Holsti K.J. (1988). *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- IEA. (2006). The Agreement between the Governments of Ukraine and Russian Federation on Export of Russian Natural Gas to Ukraine and its Transit Throught the Territory of Ukraine to European Countries, tersedia di International Energy Agency (IEA), Ukraine: Energy Policy Review 2006

- Margareth, F. K. (2017). *Identitas Dalam Hubungan Internasional: Dilema Kebijakan Luar Negeri Finlandia dalam Krisis Ukraina 2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Kim, L. (2019). How U.S. Military Aid Has Helped Ukraine Since 2014, tersedia di [How U.S. Military Aid Has Helped Ukraine Since 2014 : NPR](#)
- Marson, J. (2019). U.S. Bulks Up Ukraine's Navy to Thwart Russia, tersedia di U.S. Bulks Up Ukraine's Navy to Thwart Russia. *Wall Street Journal*.
- Mahfud, M. (2017). *Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Nation, R. C, dan Trenin, D. 2010. *Russia Security Strategy Under Putin, U.S. and Russian Perspective*, Foreign Policy Research Institute.
- Nasution, F. H. & Paramasatya, S. (2019). Peran Klub Motor Night Wolves dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Journal International Relations*, 6(1), 56-65.
- Riza, B. (2018). Pernyataan 5 Negara Soal Insiden Rusia dan Ukraina. *Tempo.co*, tersedia di <https://dunia.tempo.co/read/1149992/pe-nyataan-5-negara-soal-insiden-rusia-dan-ukraina>.
- Strong, R. A. (2000). Jimmy Carter: Foreign Affairs, tersedia di <https://millercenter.org/president/carter/foreign-affairsyang>
- Roberts, D et al. (2014). Obama extends sanctions against Russia to include wealthy Putin allies. *The Guardian*, tersedia di <https://amp.theguardian.com/world/2014/mar/20/obama-extends-sanctions-against-russia-ukraine>
- RT World. 2014. Canceled Language Law in Ukraine Sparks Concern Among Russian and EU Diplomats, tersedia di [Canceled language law in Ukraine sparks concern among Russian and EU diplomats — RT World News](#)
- Salamah, L. (2017). Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme vs Komunisme. *Jurnal Global dan Strategis*, 2(2), 225-237.
- Rane. (2018). Ukraine and Russia take their conflict to the sea. *Rane Stratfor*, tersedia di <https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea>.
- Starke J.G. (1988). *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- U.S Embassy. 2015. U.S Assistance to Ukraine Overview, tersedia di U.S. Embassy in Ukraina (usembassy.gov)
- USAID. 2015. Ukraine-Conflict, tersedia di [Ukraine Disaster Response Archive | Humanitarian Assistance | U.S. Agency for International Development \(usaid.gov\)](#)
- Welt, C. (2020). Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy. *Congressional Research Service*.